

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Efektivitas

###### a. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai kesesuaian penggunaan, hasil guna atau dukungan untuk suatu tujuan.<sup>1</sup>

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas adalah tingkat keberhasilan yang dicapai sesuai dengan tujuan yakni dari penerapan suatu model pembelajaran ataupun media, dalam hal ini diukur dari hasil, apabila hasil meningkat maka pekerjaan tersebut dapat dikatakan efektif. Pekerja yang mempunyai kinerja efektif akan terus diharapkan sebuah perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu

---

<sup>1</sup> Ana Sopanah, Irfan Fatoni, Marita Ossy Danawanti, Dwi Ekasari Harmadji, Emiliana Mulia, dkk. *Bunga Rampai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 264.

memberikan kontribusi kepada karyawan agar terus semangat dalam bekerja. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.<sup>2</sup>

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Efektivitas selalu berorientasi kepada *output* (hasil atau tujuan). Dikatakan efektif apabila tujuan maupun sasaran tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan.<sup>3</sup> Efektivitas adalah sejauh mana *output* yang dihasilkan dapat memenuhi sasaran dan tujuan manajemen, di mana ukuran efektivitas hampir selalu digunakan untuk menggambarkan kesesuaian rencana dengan realisasi.<sup>4</sup>

Menurut Handyaningrat, efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut Hidayat. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, waktu) telah tercapai. Di mana makin besar persentase target yang

---

<sup>2</sup> Febi Vernanda dan Romi Adetio Setiawan. “ Tinjauan Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan dalam Konteks Ekonomi Islam: Studi Kasus Pada Café Corner Bengkulu,” *Jurnal Keislaman* , Vol. 06, No. 02, September 2023

<sup>3</sup> Emiliana Mulia, dkk. *Bunga Rampai Akuntansi Publik...*, h. 264.

<sup>4</sup> Taufiqurokhman dan Evi Satispi, *Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik* (Tangerang Selatan: UMJ Press, 2018) h.47.

dicapai, maka akan semakin tinggi efektivitasnya.<sup>5</sup> Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasaran tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.<sup>6</sup>

b. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikan. Bila dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efisiensi berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa.

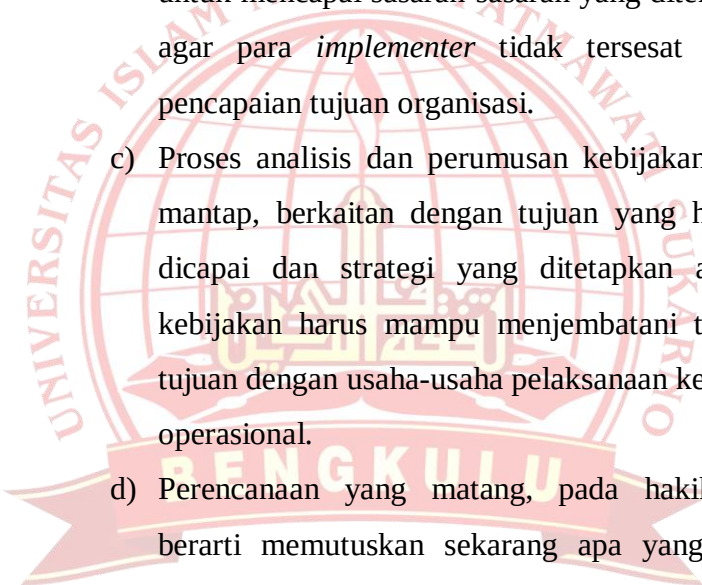
1. Kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagina adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Sisca, Erbin Chandra, Onita Sari Sinaga, Erika Revida Sukarman Purba, Fuadi, dkk. *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 61.

<sup>6</sup> Ana Sopanah, Irfan Fatoni, Marita Ossy Danawanti, Dwi Ekasari Harmadji, Emiliana Mulia, dkk. *Bunga Rampai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 264.

<sup>7</sup> Arni Eka Susantri, Dasman Lanin, dan Nora Eka Putri. “Efektivitas Pelaksanaan Program Pelayanan Publik Plus di Kecamatan Kuranji Kota Padang”, *Jurnal Of Education on Social Science (JESS)*, Vol. 2, No. 1 (2018), 4.

- 
- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
  - b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para *implementer* tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
  - c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
  - d) Perencanaan yang matang, pada hakikatnya berarti memutuskan sekarang apa yang akan dikerjakan oleh organisasi di masa depan.
  - e) Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah

satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

- f) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- g) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dari pengendalian

2. Richard M. Steers mengatakan mengenai tingkat efektivitas, sebagai berikut:<sup>8</sup>

a) Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses.

b) Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk

---

<sup>8</sup> Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 53.

mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.

c) Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

3. Teori untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu program maka diperlukan ukuran-ukuran efektivitas. Menurut Campbell, pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

a) Keberhasilan program, efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program dapat ditinjau dari proses dan mekanisme suatu kegiatan dilakukan di lapangan.

b) Keberhasilan sasaran, efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek *output*, artinya

---

<sup>9</sup> Arni Eka Susanti, Dasman Lanin, dan Nora Eka Putri. "Efektivitas Pelaksanaan Program Pelayanan Publik Plus di Kecamatan Kuranji Kota Padang", *Jurnal Of Education On Social Science (JESS)*, Vol. 2, No. 1 (2018), h. 4.

efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat *output* dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

- c) Kepuasan terhadap program, kepuasan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Kepuasan dirasakan oleh pengguna terhadap kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh pengguna semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi lembaga.
- d) Kesesuaian *input* dan *output*, pada efektivitas tingkat *output* dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*). Jika *output* lebih besar dari *input* maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika *input* lebih besar dari *output* maka dapat dikatakan tidak efisien.
- e) Pencapaian tujuan menyeluruh, sejauh mana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini merupakan penelitian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian



umum efektivitas organisasi. Sehingga efektivitas program dapat dijalankan berdasarkan dengan kemampuan

4. Teori Pengukuran keberhasilan sistem informasi yang dikemukakan oleh William H. DeLone dan Ephraim R. McLean, melalui penelitian mereka yang berjudul *the reformulated D&M is success model*. Terdapat 6 indikator dan beberapa item berikut:<sup>10</sup>

- a) Kualitas sistem (*system quality*)

Kualitas sistem merupakan karakteristik dari informasi yang melekat mengenai sistem yang mana kualitas sistem merujuk pada seberapa baik kemampuan perangkat keras, perangkat lunak, dan kebijakan prosedur dari sistem informasi yang dapat menyediakan informasi kebutuhan pengguna. Kualitas sistem dapat diukur dalam beberapa hal yaitu kemudahan penggunaan, fungsional, keandalan, fleksibilitas, kualitas data, portabilitas, integrasi dan kepentingan

- b) Kualitas informasi (*information quality*)

---

<sup>10</sup> William H. DeLone dan Ephraim R. McLean. "Keberhasilan Sistem Informasi: Pencarian Variabel", terj. *Journal of Management Information Systems*, (Maret 1992), 60-95



Kualitas informan adalah sejauh mana informasi secara konsisten dapat memenuhi persyaratan dan harapan semua orang yang membutuhkan informasi tersebut. Kualitas informasi dapat diukur dalam hal akurasi, ketepatan waktu, kelengkapan, relevansi dan konsistensi.

c) Kualitas pelayanan (*service quality*)

Kualitas pelayanan dapat diukur melalui perangkat keras (*hardware*) ataupun perangkat lunak (*software*) yang *up to date*, dapat diandalkan, kecepatan pelayanan kepada pengguna dan kepentingan pengguna.

d) Pengguna (*user*)

Pengguna sistem biasanya diukur berdasarkan frekuensi penggunaan, waktu penggunaan, jumlah akses, pola penggunaan dan ketergantungan.

e) Kepuasan pengguna (*user satisfaction*)

Kepuasan pengguna dapat diukur berdasarkan 5 komponen yaitu, konten (*content*), akurasi (*accuracy*), format (*format*), kemudahan dalam penggunaan (*easy to use*), dan actual dalam pemberian informasi (*timeliness*).

f) Keuntungan bersih (*net benefit*)

Chin dan Todd memberikan beberapa faktor yang termasuk dalam manfaat positif dan merupakan keinginan pengguna terhadap sistem informasi yaitu: menjadikan pekerjaan lebih mudah (*makes job easier*), bermanfaat (*useful*), menambah produktivitas (*increase productivity*), mempertinggi efektivitas (*enhance effectiveness*), dan mengembangkan kinerja perusahaan (*improve job performance*).

Dari sejumlah definisi-definisi pengukuran tingkat efektivitas yang telah dikemukakan diatas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini menggunakan teori *The Reformulated D&M is Succes Model* yang dikemukakan oleh William H. DeLone dan Ephraim R. McLean, mengenai pengukuran efektivitas yang mengacu pada pengukuran keberhasilan sistem informasi melalui kualitas sistem, kualitas informan, kualitas pelayanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan keuntungan bersih.

Pada penelitian ini sama-sama mengkaji tentang Efektivitas penggunaan QRIS dan keduanya menggunakan pendekatan kualitatif. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Sedangkan QRIS merupakan

satu-satunya standar *QR Code* pembayaran untuk sistem pembayaran di Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia

c. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas itu efektif. Hari Lubis dan Martani Huseini menyebutkan tiga pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:<sup>11</sup>

1) Pendekatan sumber (*resource approach*)

Pendekatan ini mengukur efektivitas berdasarkan keberhasilan suatu lembaga dalam memperoleh berbagai macam sumber yang dibutuhkannya dan juga memelihara keadaan serta sistem, hal ini dilakukan agar dapat berjalan efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, di mana dari lingkungan diperoleh sumber- sumber yang terdapat pada lingkungan sering kali bersifat langka dan bernilai tinggi.

2) Pendekatan proses (*process approach*)

Pendekatan proses adalah untuk melihat sejauh

---

<sup>11</sup> Jessica Luas, Marthen Kimbal, dan Frans Singkoh. “Efektivitas Pelayanan Publik di Kelurahan Kakaskasen Dua Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No. 2 (2017), h. 4-5.

mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

3) Pendekatan sasaran (*goals approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi “*Official Goal*” dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek *output* yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat *output* yang direncanakan.

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh

mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif.

## 2. Sistem Pembayaran

### a) Pengertian Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana, guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran lahir bersamaan dengan lahirnya konsep “uang” sebagai media pertukaran (*medium of change*) atau *intermediary* dalam transaksi barang, jasa dan keuangan. Pada prinsipnya, sistem pembayaran memiliki 3 tahap pemrosesan yaitu otorisasi, kliring, dan penyelesaian akhir (*settlement*).<sup>12</sup>

Menurut terminologi, sistem pembayaran

---

<sup>12</sup> Bank Indonesia. “Sistem Pembayaran & Pengelolaan UangRupiah”<https://www.bi.go.id/id/fungsiutama/sistempembayaran/default.aspx> (diakses pada 25 April 2021)

terdiri dari dua kata yakni “sistem” dan “pembayaran”. Kata “sistem” Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud. Atau juga bisa diartikan sebagai cara atau metode yang diatur untuk melakukan sesuatu.

Sedangkan kata “pembayaran” diartikan sebagai perpindahan nilai antara dua pihak. Secara sederhana, kedua belah pihak dimaksud adalah pihak pembeli dan pihak penjual. Jadi pada saat bersamaan terjadi perpindahan barang atau jasa. Dengan pengertian ini, maka dalam setiap kegiatan ekonomi, di mana terjadi perpindahan barang atau jasa, pasti melibatkan apa yang disebut dengan proses pembayaran.<sup>13</sup>

Sistem pembayaran adalah mekanisme yang memungkinkan penyelesaian atau transfer dana antara pembeli dan penjual, atau antar bank. Sistem pembayaran merupakan bagian yang sangat penting dari perekonomian dan infrastruktur keuangan. Dapat dikatakan bahwa sistem pembayaran merupakan tulang punggung perekonomian dan menjadi infrastruktur utama

---

<sup>13</sup> Aulia Pohan, *Sistem Pembayaran* (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), 70.

untuk perdagangan. Sistem pembayaran memfasilitasi penyelesaian perdagangan dengan menggunakan berbagai inovasi pembayaran untuk mempertimbangkan nilai tukar.<sup>14</sup>

Disisi lain, sistem pembayaran dapat memberikan tekanan dan risiko tertentu bagi pesertanya, dan dapat juga menjadi saluran untuk berpindahnya krisis keuangan dari satu sistem dari satu sistem ekonomi atau keuangan di suatu negara kepada negara lainnya. Oleh karena itu, keberadaan sistem pembayaran yang aman, andal dan efisien sangat penting dalam infrastruktur keuangan suatu negara dan menjadi tanggung jawab bersama antara peserta dan otoritas sistem pembayaran untuk menjamin tercapainya stabilitas, keamanan, dan perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan aktivitas perbankan, moneter dan sistem pembayaran.<sup>15</sup>

Meskipun di dalam teori sistem pembayaran terlihat sebagai sistem yang sederhana untuk mengirimkan dana dari satu pihak ke pihak lainnya, sistem pembayaran sesungguhnya merupakan suatu prosedur yang kompleks untuk

---

<sup>14</sup> Solikin M. Juhro, *Pengantar Kebanksentralan Teori dan Kebijakan* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), h. 223

<sup>15</sup> M. Juhro, *Teori dan Kebijakan*, h.223-224



menjamin terkirimnya dana secara cepat, aman, dan efisien. Agar transfer dana dapat terselenggara secara murah dengan risiko yang bersifat moderat dan dapat memfasilitasi transaksi perekonomian dengan baik, diperlukan berbagai komponen yang saling berkaitan satu sama lain secara komprehensif untuk memastikan terselenggaranya sistem pembayaran yang aman, andal, dan efisien serta dapat memperluas akses dan memberikan perlindungan kepada konsumennya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep sistem pembayaran yang cepat, aman, handal dan efisien.<sup>16</sup>

#### b) Evolusi Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran tidak dapat dipisahkan dari perkembangan uang dalam fungsinya untuk menyelesaikan transaksi dari berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu atau institusi di dalam masyarakat. Institusi dan sistem pembayaran yang digunakan dalam menyelesaikan transaksi perekonomian mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan peradaban masyarakat dan teknologi informasi.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> M. Juhro, *Teori dan Kebijakan...*, h.224-225

<sup>17</sup> M. Juhro, *Teori dan Kebijakan...*, h.225-226.

Sistem pembayaran terus berevolusi mengikuti evolusi uang dengan 3 unsur penggerak yaitu inovasi teknologi & model bisnis, tradisi masyarakat, dan kebijakan otoritas. Awal mula alat pembayaran yaitu sistem barter antar barang yang diperjual belikan. Hanya saja masalah muncul ketika dua orang ingin bertukar tidak sepakat dengan nilai pertukarannya atau salah satu pihak tidak terlalu membutuhkan barang yang akan ditukar.<sup>18</sup>

Untuk mengatasi hal itu, manusia mengembangkan uang komoditas. Komoditas di sini adalah barang dasar yang hampir dibutuhkan oleh semua orang, misalnya garam, teh, tembakau, hingga biji-bijian. Hewan termasuk digunakan sebagai uang komoditas pada tahun 900 hingga 6000 sebelum masehi (SM). Gandum, sayuran, dan tumbuhan kemudian juga dijadikan uang komoditas setelah muncul budaya pertanian

Selanjutnya uang primitif mulai digunakan sekitar tahun 1200 SM dan berupa cangkang kerang atau cangkang hewan lainnya. Orang Tionghoa mulai memproduksi imitasi kerang

---

<sup>18</sup>Bank Indonesia. "Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah", <https://www.bi.go.id/id/fungsiutama/sistempembayaran/default.aspx> (diakses pada 25 April 2021).

*cowrie* yang terbuat dari logam dan tembaga. Sekitar tahun 100 SM, potongan kulit rusa putih dengan ukuran dan diberi berbagai jenis warna juga pernah digunakan sebagai alat pembayaran.

Uang kertas mulai digunakan sebagai alat pembayaran. Swedia merupakan negara pertama di benua Eropa yang menggunakan uang kertas di tahun 1661 setelah pabrik kertas didirikan pada tahun 1150 di Spanyol.

#### a. Sistem Pembayaran Digital

Pembayaran secara umum dapat diartikan sebagai perpindahan sejumlah uang dari si pembayar ke penerima. Pembayaran digital adalah pembayaran berbasis teknologi. Di dalam pembayaran digital uang disimpan, diproses, dan diterima dalam bentuk informasi digital dan proses pemindahannya diinisialisasi melalui alat pembayaran elektronik. Pembayaran secara tradisional dilakukan melalui uang tunai, cek, atau kartu kredit sedangkan pembayaran digital dilakukan menggunakan *software* tertentu, kartu pembayaran digital antara lain: aplikasi pemindahan uang, infrastruktur jaringan, peraturan dan prosedur yang memerintahkan kegunaan dari

sistem tersebut.<sup>19</sup>

Sistem pembayaran secara digital menyediakan cara pembayaran untuk pembelian barang ataupun jasa melalui internet. Berbeda dengan sistem pembayaran biasanya, pelanggan mengirimkan seluruh data yang berkaitan dengan pembayaran kepada penjual melalui internet, tidak ada interaksi eksternal yang jauh antara pelanggan dan penjual (dengan mengirimkan faktur melalui e-mail atau konfirmasi melalui fax). Sekarang ini, sudah lebih dari 100 macam sistem pembayaran secara elektronik.<sup>20</sup>

### **3. Transaksi Dalam Ekonomi Islam**

#### **a. Teori Transaksi**

Pada dasarnya transaksi adalah persetujuan jual beli (diperdagangkan) antar dua pihak (penjual dan pembeli)<sup>21</sup>. Selain itu transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun atas nama perusahaan dalam melakukan jual beli. Dalam kaidah hukum yang berlaku menyatakan bahwa semua hal dilarang, kecuali

---

<sup>19</sup> Jefry Tarantang, Annisa Awwaliyah, Maulidiana Astuti, dan Meidinah Munawaroh. "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia", *Jurnal Al Qardh*, Vol. 4, No. 1 (Juli 2019), h. 65.

<sup>20</sup> Meidinah Munawaroh, *Sistem Pembayaran Digital...*, h.65-66

<sup>21</sup> Kbbi.co.id diakses 12 Febuari 2018, pukul: 20.30

yang ada ketentuannya berdasarkan Al-quran dan Al-hadits. Sedangkan dalam urusan atau transaksi muamalah, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Transaksi adalah situasi atau kejadian yang melibatkan unsur lingkungan dan mempengaruhi posisi keuangan. Setiap transaksi harus dibuatkan keterangan tertulis seperti faktur atau nota penjualan atau kuitansi dan disebut dengan bukti transaksi. Dalam akuntansi suatu transaksi diukur dengan satuan mata uang. Perdagangan atau jual beli secara al-mubadalah (saling menukar).<sup>22</sup>

Menurut Van Fleet menyebutkan bahwa e-wallet menjadi metode pembayaran yang paling banyak di minati saat berbelanja online. Sebanyak 65% responden menggunakan e-wallet saat berbelanja online atau tidak secara langsung. 51% responden menetapkan pilihan via transfer bank maupun virtual account yang mana ini digunakan sebagai transaksi belanja di toko online. Selanjutnya 39% responden menetapkan pembayaran melalui marketmart. 27% menjawab fitur pembayaran dengan menggunakan sistem menyicil atau

---

<sup>22</sup> Natasya, "Analisis Sistem Pengendalian Intern Persediaan Barang Dagang Dan Penerapan Akuntansi Pada Pt. Cahaya Mitra Alkes" *jurnal EMBA* Vol.2 No.3 September 2014, 013-021

paylater, 11% menggunakan kartu debit, 6% menggunakan kartu kredit dan 1% memilih menggunakan metode transaksi berupa digital lainnya.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Maksud dari ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan rukun-rukun dan syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Menurut pandangan fuqaha Malikiyah, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli yang bersifat khusus dan jual beli umum. Jual beli dalam arti umum ialah sesuatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang yang ditukarkan adalah berupa dzat (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.<sup>23</sup>

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-

---

<sup>23</sup> Qamarul huda, Fiqih Muamalah,(Yogyakarta: TERAS, 2011), 52.

menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada di hadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>24</sup> Adapun jual beli secara bahasa yang artinya memindahkan hak milik terhadap benda akad saling mengganti, dikatakan” Ba’a asy-syaia jika ia mengeluarkannya dari hak miliknya dan ba’ ahu jika ia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawanya seperti perkataan syara artinya mengambil dan syara’ yang berarti menjual.<sup>25</sup> Secara terminologi jual beli mempunyai makna yang luas. Segala bentuk yang berkaitan dengan proses pemindahan hak milik barang atau asset kepada orang lain termasuk dalam lingkup pengertian jual beli. Jual beli bisa berupa

---

<sup>24</sup> Fiqih Muamalah..., h. 52-53

<sup>25</sup> Abdul Aziz, fiqh Muamalat, sistem transaksi dalam fiqh islam, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 23.



pertukaran antara barang dengan barang atau barter (muqayyadah). Secara hukum, Islam tidak merinci secara jeli mengenai jenis-jenis jual beli yang diperbolehkan. Islam hanya menggaris bawahi norma-norma umum yang harus menjadi pijak-pijak bagi sebuah sistem jual beli. Norma-norma ini menjadi haluan bagi semua jual beli yang hendak dilakukan oleh umat Islam. Dengan kata lain, Islam menghalalkan segala macam bentuk jual beli asalkan tidak melanggar norma-norma yang ada. Sebenarnya definisi jual beli adalah akad yang mempunyai saling menukar yaitu dengan cara menghilangkan mudhaf (kata kesadaran).<sup>26</sup>

b. Alat Pembayaran Digital

1. Pengertian alat pembayaran digital

Alat pembayaran ialah barang atau alat yang digunakan untuk memindahkan dana dari sebuah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi seperti jual beli merupakan kegiatan yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita, hampir setiap hari kita melakukan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Transaksi ini bisa terjadi di warung, supermarket, pasar,

---

<sup>26</sup> Dede Nurohman, Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam, (Yogyakarta: TERAS, 2011), h. 62-63.

hingga toko online. Untuk itu alat pembayaran yang digunakan dalam kegiatan transaksi tidak dapat dipisahkan. Setiap negara memiliki mata uang yang digunakan untuk melakukan transaksi sehari-hari. Saat ini kegiatan transaksi tidak hanya dapat dilakukan secara offline melainkan dapat dilakukan secara online, baik melalui e-commerce maupun social media. E-Payment diartikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana uang yang digunakan untuk transaksi disimpan dalam bentuk media elektronik, E-Payment sering disebut dengan uang elektronik (Electronic Money). Cara penggunaan dari e-money juga sangat mudah yakni pengguna harus menitipkan uangnya kepada penerbit untuk dikonversikan menjadi saldo uang elektronik dalam media elektronik yang dimiliki oleh pengguna kemudian pengguna dapat menggunakan saldo tersebut untuk bertransaksi.

Bank Indonesia mendefinisikan uang elektronik sebagai alat transaksi yang terpenuhi beberapa unsur dibawah ini:

- a. “Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;”

- b. “Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan”
- c. “Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.”<sup>27</sup>

Dalam perspektif islam penggunaan QRIS (uang elektronik) diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut DSN-MUI) Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik Syariah. (DSN-MUI, 2017) Fatwa ini dijadikan sebagai acuan dalam penggunaan uang elektronik, hal ini pun termuat pada firman Allah dalam Q.S An-nisa ayat 58, yang artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya....”. Tidak hanya dalam surat tersebut, firman Allah yang menjadi dasar hukum disahkannya fatwa No.116 melainkan masih banyak surah-surah lain dan beberapa hadist, diantaranya hadist Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakek ‘Amr bin ‘Amr bin Auf al

---

<sup>27</sup> Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik” (Bank Indonesia, 5 Maret 2018),h. 3

Muzani dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin ‘Amr bin ‘Auf r.a yang artinya “Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyarah untuk mufakat) boleh dikatakan diantara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. Tentang Uang Elektronik Syariah, Uang Elektronik (electronic money) ialah alat transaksi yang terpenuhi beberapa unsur dibawah ini:

“Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;”

- a. “Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;”
- b. “Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan”
- c. “Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan

penerbit uang elektronik tersebut.”

Fatwa diatas pun menjelaskan uang elektronik (emoney) syariah sebagai uang elektronik (e-money) yang memenuhi beberapa prinsip syariah.<sup>28</sup>

## 2. Konsep Uang Elektronik Dalam Islam

Secara umum uang diartikan sesuatu yang bisa diterima oleh umum di dalam wilayah tertentu sebagai alat pembayaran untuk digunakan sebagai alat pembelian jasa dan barang yang diperjual belikan. Uang elektronik atau biasa disebut dengan uang digital yang dalam Bahasa Inggris disebut (electronic money, digital money, digital cash, electronic cash,) merupakan bentuk uang tanpa uang fisik atau bisa dikatakan uang non tunai.

Fungsi dari (e-money) ialah sebagai alat transaksi pembayaran, hal ini sesuai pada Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, dalam pasal 1(3) dijelaskan uang elektronik diartikan sebagai alat transaksi

---

<sup>28</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa DSN-MUI No 116/DSN-MUI/IX/2017 Uang Elektronik Syariah” (DSN-MUI, 19 September 2017), h. 7.

pembayaran apabila terpenuhi beberapa unsur dibawah ini:

- a. “Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.”
- b. “Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip.”
- c. “Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, dan”
- d. “Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.”

Berdasarkan Peraturan tersebut sangat tepat jika fungsi uang elektronik tidak lain sebagai alat transaksi pembayaran. Konsep uang dalam Islam tepat dan tegas jika uang bukanlah capital dan uang adalah uang. Berbeda dengan ekonomi konvensional, uang sering didefinisikan terbalik, yakni uang sebagai capital dan uang sebagai uang. Karenanya, dalam Islam fungsi dari uang hanya dipergunakan sebagai motif berjaga-jaga dan motif transaksi pembayaran serta sebagai public

goods, yakni uang kekayaan umum di dalam peredaran suatu ekonomi disamping menjadi kekayaan pribadi. Dalam ekonomi Islam, fungsi uang juga diposisikan sebagai metode penyimpanan nilai dan penukar, tidak digunakan untuk komoditas (barang dagangan). Secara umum fungsi uang dalam ekonomi Islam yaitu:

- a. Alat tukar, maksudnya uang bisa ditukarkan atas barang atau jasa yang diperjual belikan.
- b. Satuan hitung, maksudnya uang bisa menunjukkan nilai dari suatu barang atau jasa yang diperjual belikan.
- c. Alat penyimpan nilai, maksudnya uang bisa menyimpan nilai sejumlah kekayaan senilai dengan uang yang disimpan. Uang yang disimpan dapat berupa uang tunai maupun uang yang disimpan di bank dalam bentuk rekening. Pada uang elektronik uang disimpan pada suatu media server atau chip
- d. Standar pencicilan hutang, artinya uang bisa memudahkan dalam menetapkan batasan pencicilan utang piutang dengan tunai atau diangsur.



#### 4. Penjualan

##### a. Pengertian Penjualan

Menurut Basu Swastha DH penjualan adalah interaksi antara individu saling bertemu muka yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai, atau mempertahankan hubungan pertukaran sehingga menguntungkan bagi pihak lain.<sup>29</sup> Penjualan dapat diartikan juga sebagai usaha yang dilakukan manusia untuk menyampaikan barang bagi mereka yang memerlukan dengan imbalan uang menurut harga yang telah ditentukan atas persetujuan bersama.

##### a) Tujuan penjualan

Kemampuan perusahaan dalam menjual produknya menentukan keberhasilan dalam mencari keuntungan, apabila perusahaan tidak mampu menjual maka perusahaan mengalami kerugian. Menurut Basu Swasta tujuan umum penjualan perusahaan yaitu:

- 1) Mencapai volume penjualan
- 2) Mendapatkan laba tertentu
- 3) Menunjang pertumbuhan perusahaan

##### b) Faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan

Aktivitas penjualan banyak dipengaruhi oleh

---

<sup>29</sup> Basu Swastha Dharmmesta. *Manajemen Pemasaran*.( BPFE: Yogyakarta, 2019)

faktor yang dapat meningkatkan aktivitas perusahaan, oleh karena itu manajer penjualan perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan menurut Basu Swastha sebagai berikut :

1) Kondisi dan kemampuan penjual

Kondisi dan kemampuan terdiri dari pemahaman atas beberapa masalah penting yang berkaitan dengan produk yang dijual, jumlah dan sifat dari tenaga penjual adalah:

- a) Jenis dan karakteristik barang atau jasa yang ditawarkan
- b) Harga produk atau jasa
- c) Syarat penjualan, seperti: pembaruan, pengiriman

2) Kondisi pasar

Pasar mempengaruhi kegiatan dalam transaksi penjualan baik sebagai kelompok pembeli atau penjual. Kondisi pasar dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni : jenis pasar, kelompok pembeli, daya beli, frekuensi pembelian serta keinginan dan kebutuhannya.

3) Modal

Modal atau dana sangat diperlukan dalam rangka untuk mengangkut barang dagangan ditempatkan atau untuk membesar usahanya. Modal perusahaan dalam penjelasan ini adalah modal kerja perusahaan yang digunakan untuk mencapai target penjualan yang dianggarkan, misalnya dalam menyelenggarakan stok produk dan dalam melaksanakan kegiatan penjualan memerlukan usaha seperti alat transportasi, tempat untuk menjual, usaha promosi dan sebagainya.

4) Kondisi organisasi perusahaan

Pada perusahaan yang besar, biasanya masalah penjualan ini ditangani oleh bagian tersendiri, yaitu bagian penjualan yang dipegang oleh orang-orang yang ahli dibidang penjualan.

5) Faktor-faktor lain

Faktor-faktor lain seperti periklanan, peragaan, kampanye, dan pemberian hadiah sering mempengaruhi penjualan karena diharapkan dengan adanya faktor-faktor tersebut pembeli akan kembali membeli

lagi barang yang sama. Menurut Efendi Pakpahan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi volume penjualan adalah saluran distribusi yang bertujuan untuk melihat peluang pasar apakah dapat memberikan laba yang maksimum.<sup>30</sup>

Secara umum mata rantai saluran distribusi yang semakin luas akan menimbulkan biaya yang lebih besar, tetapi semakin luasnya saluran distribusi maka produk perusahaan akan semakin dikenal oleh masyarakat luas dan mendorong naiknya angka penjualan yang akhirnya berdampak pada peningkatan volume penjualan.

c) Pengertian volume penjualan

*Volume* penjualan merupakan hasil akhir yang dicapai perusahaan dari hasil penjualan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.

Volume penjualan tidak memisahkan secara tunai maupun kredit tetapi dihitung secara keseluruhan dari total yang dicapai. Seandainya volume penjualan meningkat dan biaya distribusi menurun maka tingkat pencapaian laba perusahaan meningkat tetapi

---

<sup>30</sup> Efendi Pakpahan, *Volume Penjualan* . (Jakarta: PT. Bina Initama Sejahtera, 2020).

sebaliknya bila volume penjualan menurun maka pencapaian laba perusahaan juga menurun. Ada beberapa usaha untuk meningkatkan volume penjualan, diantaranya adalah :

- 1) Menjajakan produk dengan sedemikian rupa sehingga konsumen melihatnya .
- 2) Menempatkan dan pengaturan yang teratur sehingga produk tersebut akan menarik perhatian konsumen.
- 3) Mengadakan analisa pasar.
- 4) Menentukan calon pembeli atau konsumen yang potensial.
- 5) Mengadakan pameran.
- 6) Mengadakan discount atau potongan harga.

## **5. UMKM**

- 1) Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia (UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah), UMKM didefinisikan sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha

perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000, 00 (Lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha Kecil

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau.
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.

10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

## 2) Penguatan Modal UMKM

Penguatan modal erat kaitannya dengan teori pemberdayaan. Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif, dengan keterlibatan semua potensi. Pemberdayaan dapat disamakan dengan keberhasilan usaha. Artinya tolak ukur pemberdayaan dapat disamakan dengan keberhasilan usaha. Keberhasilan usaha dapat diukur dari berbagai segi, diantaranya adalah dari laba usaha yang berhasil dicapai oleh para pengusaha dalam kurun waktu tertentu. Keberhasilan usaha juga diidentikkan dengan perkembangan perusahaan, yaitu proses peningkatan kuantitas dan dimensi perusahaan. Perkembangan perusahaan adalah penambahan karyawan, peningkatan aset, pendapatan, dan lain-



lain . Pariyem dalam Agustin Bunga berpendapat bahwa terdapat tiga variabel dalam pertumbuhan UMKM, diantaranya peningkatan produksi, penjualan dan pendapatan.

Tiga variabel dalam pertumbuhan UMKM memiliki indikator nya masing masing. Indikator dari aspek peningkatan produksi adalah produktivitas, kapasitas, kecepatan pengiriman, kualitas produk, kecepatan proses dan fleksibilitas. Indikator dari peningkatan penjualan adalah ketercapaian volume atau jumlah penjualan, mendapatkan laba dan menunjang pertumbuhan usaha. Indikator peningkatan pendapatan meliputi diantaranya penghasilan yang diterima, beban keluarga yang ditanggung.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pertumbuhan usaha menurut Pariyem sebagai *grand theory*.

#### 1) Fungsi dan Peran UMKM

Fungsi dan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki signifikansi yang penting dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, dan keamanan. Peran dan fungsi UMKM tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,

mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan, serta mengurangi pola urbanisasi yang terjadi saat ini .

Adapun peran dan fungsi usaha mikro kecil menengah yaitu sebagai berikut:

a. Penyerapan tenaga kerja

Usaha mikro berperan dalam menampung tenaga kerja atau sekelompok orang yang dapat bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat.

b. Pemerataan pendapatan

Jumlah usaha mikro di Indonesia sangat banyak dan kualitasnya terbagi berdasarkan berbagai jenis usaha dan bidang kegiatan. Karena kondisi ini, banyak orang yang bisa ikut memanfaatkannya untuk menghindari pengangguran atau mendapatkan penghasilan.

c. Nilai tambahan bagi produk daerah

Jika potensi sumber daya alam daerah dikuasai oleh pengusaha mikro, maka kondisi ini membawa nilai tambah baik terhadap produk itu sendiri maupun nilai produk yang lebih tinggi di daerah tersebut.

d. Peningkatan taraf hidup

Dengan adanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor, termasuk usaha mikro, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, baik tenaga kerja yang masih menganggur ataupun semi penganggur sehingga mereka dapat menghasilkan guna memenuhi kebutuhan diri dan keluarga .<sup>31</sup>

## 6. QRIS

### a. Pengertian Qris

Bank Indonesia resmi merilis standar untuk penggunaan QR Code Indonesia atau QRIS. Setiap penyedia Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) berbasis QR wajib menggunakan QRIS yang diatur dalam Bank Indonesia pada ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 21/18/2019 tentang Implementasi Standar Internasional QRIS untuk Pembayaran. QRIS merupakan satu-satunya standar QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran di Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dengan Asosiasi Sistem Pembayaran

---

<sup>31</sup> Akbar Anugrah, Romi Adetio Setiawan, dan Andi Cahyono, “Tranformasi Program Bengkulu Makmur Terhadap Peningkatan Kondisi usaha Mustahik : Analisi Sebelum dan Sesudah”, *Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance*, Vol. 6, No. 2, November 2023

Indonesia (ASPI).<sup>32</sup>

Melalui saluran elektronik, perbankan syariah memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transaksi secara digital . Hal ini dapat dilihat dari pengimplementasian QRIS mobile banking yang bertujuan untuk membentuk kode QR standar nasional. Dengan memanfaatkan QRIS, semua transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat, hemat dan efisien. Di sisi lain, menggunakan QRIS dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkat dan lebih optimal inklusi keuangan.

Mengingat tingkat penetrasi seluler dan internet yang tinggi di Indonesia, system QRIS memiliki potensi yang signifikan dalam mendorong penerimaan transaksi tanpa uang tunai dan berkontribusi pada terwujudnya Cashless Societ.

Transaksi dengan menggunakan layanan QRIS mobile banking bank syariah terus mengalami peningkatan

^ Dalam menghadirkan pengalaman transaksi yang semakin terintegrasi dan efisien, BSI terus

---

<sup>32</sup> Dyah Ayu Paramithadan Dian Kusumaningtyas, *QRIS*(Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2020),h. 54.

meningkatkan peran platform digital sebagai pintu masuk utama, terutama melalui QRIS yang mencapai 266,5 juta transaksi. BSI telah menjalin kemitraan dengan sebanyak 221 ribu merchant di berbagai sektor, seperti makanan & minuman, fashion, dan barang kebutuhan sehari-hari.

Tidak hanya itu, BSI terus berinovasi untuk memberikan fitur-fitur keuangan terbaik bagi nasabahnya, seperti mencakup fitur pembiayaan di BSI Mobile, pembukaan rekening, dan deposito melalui face interface, pembayaran donasi dan ZISWAF, serta penarikan uang tunai tanpa kartu di berbagai lokasi, seperti ATM BSI, Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi di seluruh Indonesia. Hingga September 2023, BSI Mobile mencatat volume transaksi sebesar 266,3 juta, mencatat pertumbuhan yang signifikan sebesar 42,25% year on year.

Sementara itu, jaringan ATM BSI yang tersebar luas mencapai 2.559 unit dengan total transaksi mencapai 13,7 juta transaksi. Di samping itu, keberadaan agen-agen pintar BSI Smart yang tersebar di seluruh Indonesia mencapai 88 ribu agen, memberikan pelayanan untuk berbagai transaksi seperti penarikan uang tunai, transfer

antar bank, serta pembayaran listrik dan PDAM<sup>33</sup>.

Pelanggan dapat dengan efisien menggunakan fitur BSI QRIS dalam aplikasi BSI Mobile untuk melakukan distribusi ZISWAF secara non-tunai. Tren ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap QRIS dalam transaksi keuangan semakin meningkat.<sup>34</sup>

QR Code agar satu kode bisa dipakai melalui layanan pembayaran yang berbeda. Standar Nasional QR Code diperlukan untuk mengantisipasi inovasi teknologi dan perkembangan kanal pembayaran menggunakan QR Code yang berpotensi menimbulkan fragmentasi baru industri sistem pembayaran serta untuk memperluas akseptasi pembayaran nontunai nasional secara lebih efisien.<sup>35</sup> Dengan satu QR Code, penyedia barang dan jasa (*merchant*) tidak perlu memiliki berbagai jenis QR Code dari berbagai penerbit.

---

<sup>33</sup> Bank syariah indonesia ‘ jalin kemitraan dengan 221 ribu marchet QRIS, BSI dorong digitalisasi pembayaran <https://www.bankbsi.co.id/13> januari 2025).

<sup>34</sup> Fajar Sodika,\* , & Alex Fahrur Rizaa,” Potensi QRIS M-banking Bank Syariah sebagai Teknologi Pembayaran untuk Mendukung Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia”, Jurnal Ekonomi Indonesia • Volume 12 Number 2, 2023: 125–154 p-ISSN: 0854-1507; e-ISSN: 2721-222X

<sup>35</sup> Rina Mayanti, “Faktor-faktor yang Memengaruhi Penerimaan User Terhadap Penerimaan *Quick Response Indonesia Standard* sebagai teknologi Pembayaran pada Dompot Digital”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Vol.25, No. 02 (Agustus, 2020), h. 125.

QRIS disusun dengan menggunakan standar internasional *europay, mastercard, visa* (EMV) Co. Standar ini diadopsi untuk mendukung interkoneksi yang lebih baik dan bersifat *open source*<sup>36</sup>serta mengakomodasi kebutuhan spesifik negara sehingga memudahkan interoperabilitas antar penyelenggara, antar instrumen, termasuk antar negara. Saat ini standar tersebut juga telah digunakan di berbagai negara seperti India, Thailand, Singapore, Malaysia, Korea Selatan, dll.

Bank Indonesia sendiri mengusung tema semangat “UNGGUL” dari adanya QRIS, yaitu:<sup>37</sup>

1) Universal

QRIS bersifat inklusif, digunakan untuk seluruh lapisan masyarakat dan bisa digunakan untuk transaksi pembayaran di domestik maupun luar negeri.

2) Gampang

Masyarakat bisa bertransaksi dengan mudah dan aman cukup dengan menggunakan *smartphone*/ponsel.

3) Untung

---

<sup>36</sup> *Open source* adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu individu / lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber yang tersebar dan tersedia bebas.

<sup>37</sup> Dyah Ayu Paramitha dan Dian Kusumaningtyas, *QRIS* (Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2020),h. 31.



QRIS menguntungkan pembeli dan penjual karena transaksi berlangsung efisien melalui satu kode QR yang bisa digunakan untuk semua aplikasi pembayaran pada ponsel.

4) Langsung

Pembayaran dengan QRIS langsung diproses seketika. Karena prosesnya cepat sehingga mendukung kelancaran sistem pembayaran.

Jadi tujuan adanya QRIS ini agar pembayaran digital jadi lebih mudah bagi masyarakat dan dapat diawasi oleh regulator dari satu pintu, maksudnya adalah ‘satu sistem untuk semua model pembayaran’. Maka QRIS bisa digunakan di semua *merchant* yang kerja sama dengan PJSP seperti OVO, LinkAja, Gopay, DANA, Bukalapak, dan lainnya.<sup>38</sup>

b. Kelebihan dan Kelemahan QRIS

Ada beberapa kelebihan QRIS yang berdampak positif, diantaranya:<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Ana Srikaningsih, *QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0* (Yogyakarta: Andi, 2020), h. 5.

<sup>39</sup> Dyah Ayu Paramitha dan Dian Kusumaningtyas, *QRIS* (Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2020), h. 36

1) Pembayaran nontunai lebih efisien

Sesuai dengan anjuran pemerintah untuk meningkatkan Gerakan Nontunai ini bisa menjadi salah satu dukungannya, yaitu meningkatkan penggunaan uang elektronik. Di mana untuk memenuhi suatu kebutuhan dalam bertransaksi secara tunai, harus membawa uang kas yang memerlukan tempat dan perhitungan dalam bertransaksi.

2) Antisipasi tindakan criminal

Penggunaan uang elektronik meminimalisir terjadinya tindakan kejahatan, maraknya pencurian dan perampokan di perjalanan juga menjadi risiko tersendiri bagi kita yang sering membawa uang tunai secara berlebihan. Dan juga untuk menghindari *skimming* oleh para *hacker*.

3) Persaingan bisnis meningkat

Maraknya penggunaan uang elektronik menjadikan masyarakat semakin mudah dalam bertransaksi, dengan ini diharapkan juga diikuti perkembangan dunia bisnis di Indonesia. Bahkan sekarang juga mulai diterapkan di pusat pertokoan, perbelanjaan dan pasar modern.

4) Semua kalangan bisa menggunakan QRIS

QRIS bisa dimanfaatkan untuk semua kalangan, baik muda maupun tua, dan kalangan atas sekaligus kalangan menengah ke bawah. Karena dengan menjamurnya kemudahan IPTEK memicu masyarakat untuk mencoba mengikuti perkembangan jaman ini.

Selain manfaat yang didapat, kelemahan dalam penggunaan QRIS untuk saat ini, dikarenakan perkembangan pembangunan di Indonesia yang belum merata ini juga diimbangi belum meratanya jangkauan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk masyarakat. Masih banyak jaringan internet di Indonesia yang belum stabil. Bahkan di beberapa daerah pun penggunaan *handphone* masih hanya dinikmati kaum millenial. Tentunya ini menjadi tidak merata dalam segi penggunaannya, untuk masyarakat yang tergolong ekonomi rendah dan usia tua belum sepenuhnya paham mengoperasikan *gadget*.<sup>40</sup>

- c. Keberadaan QRIS sebagai produk teknologi dalam perspektif Islam Dompot digital adalah hal baru dalam sistem pembayaran. Dalam pandangan

---

<sup>40</sup> Dian Kusumaningtyas, *QRI...*, h.36-37

Islam, khususnya dalam bidang muamalah memegang prinsip “pada dasarnya dalam hal muamalah semuanya itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya”, sehingga Islam memandang suatu perubahan sebagai sunnatullah.<sup>41</sup>

Hukum dompet digital adalah diperbolehkan dan legal karena adanya dompet digital yang memudahkan transaksi ketika masyarakat tidak membawa uang tunai. Namun, tetap memperhatikan syariat Islam saat menggunakannya. Soal halal dan haram dompet digital, sebenarnya kembali lagi ke pengguna dompet digital. Secara umum, pihak *online* memberikan informasi khusus konsumen tentang persyaratan penggunaan, yang harus disetujui.<sup>42</sup>

## **B. KERANGKA BERFIKIR PENELITIAN**

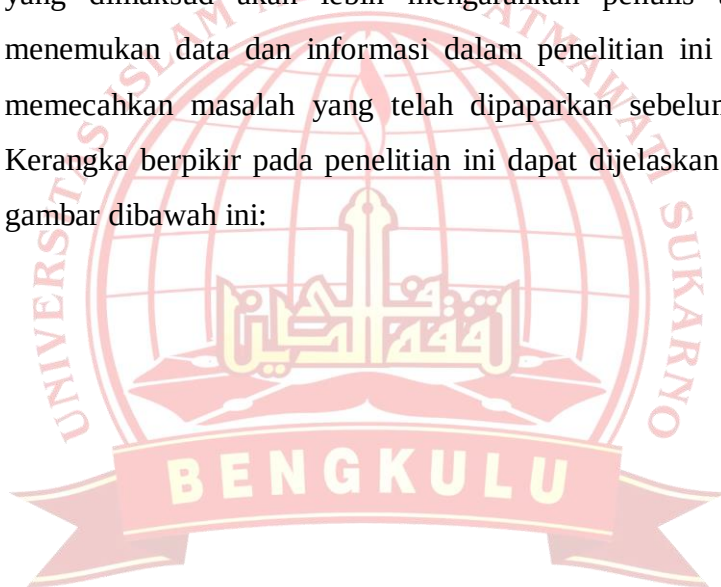
Kerangka berpikir merupakan sistem hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis

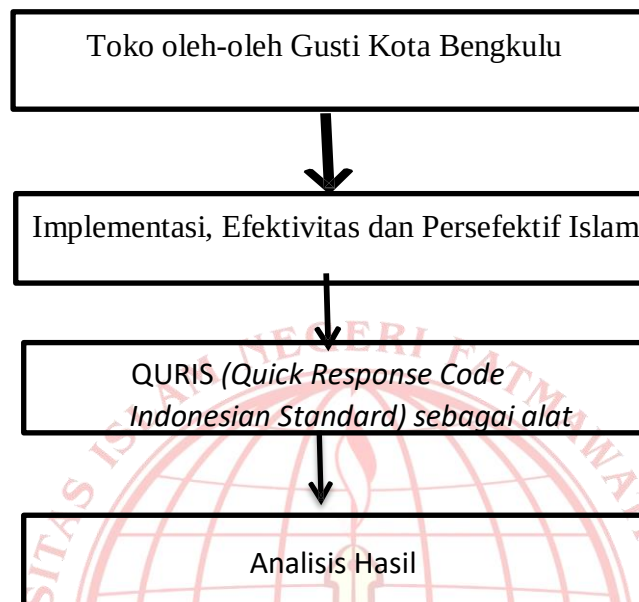
---

<sup>41</sup> Ulin Nuha, Moh Nurul Qomar, dan Rafika Anissa Maulana. “Perlukah *E-wallet* Berbasis Syariah?”, *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 4, No. 1 (2020), h. 64.

<sup>42</sup> Rafika Anissa Maulana. “Perlukah *E-wallet* Berbasis Syariah...”, h.64-65.

sehingga menghasilkan sintesis tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa yang berhubungan dengan variabel selanjutnya digunakan sebagai perumusan hipotesis untuk mengetahui masalah apa yang akan dibahas. Untuk mendekatkan masalah yang akan dianalisa pada permasalahan penelitian, maka perlu dibuat kerangka berpikir sebagai dasar pemikiran penelitian ini. Kerangka yang dimaksud akan lebih mengarahkan penulis untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Kerangka berpikir pada penelitian ini dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini:





Keterangan :

Gambar diatas menunjukan bahwa alur penelitian ini adalah sebagai berikut : penelitian ini dilakukan pada Toko oleh-oleh Gusti Kota Bengkulu mengenai implementasi, efektivitas dan perspektif islam pada penggunaan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) sebagai alat transaksi yang digunakan oleh Toko oleh-oleh Gusti Kota Bengkulu